

**UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
PROGRAM INKLUSI SOSIAL OLEH DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

SHIVA UMEIRA
NIM. 210503075

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
INKLUSI SOSIAL OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana
(S-1) Ilmu Perpustakaan**

Diajukan Oleh:

**SHIVA UMEIRA
NIM. 210503075**

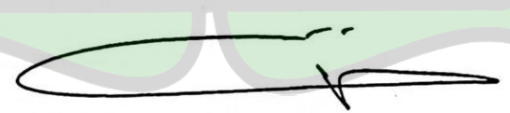
**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi (S-1) Ilmu Perpustakaan**

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing


**Nurhayati Ali Hasan, M.LIS
NIP. 197307281999032002**

Disetujui Oleh ketua Prodi Ilmu Perpustakaan


**Mukhtaruddin, S.Ag., M.L.I.S.
NIP.197711152009121001**

SKRIPSI

UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM INKLUSI SOSIAL OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PIDIE JAYA

Telah Diuji Oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Ar-Raniry dan **Dinyatakan Lulus** Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan

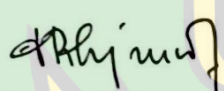
Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi'ul Awal 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

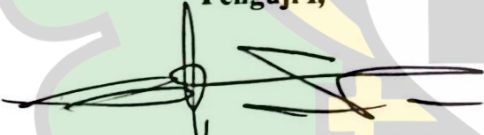
Sekretaris,


Nurhavati Ali Hasan, M.LIS.
NIP. 197307281999032002


Ade Nufus, S.IP., M.A.
NIP. 199304042025052003

Penguji I,

Penguji II,


Umar bin Abd. Aziz, S.Ag., S.S., M.A.
NIP. 197011071999031002


Asnawi, S.IP., M.IP.
NIP. 198811222020121010

A R - Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Syarifuddin, M.Ag., Ph.D
NIP. 197801011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shiva Umeira

NIM : 210503075

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie Jaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya saya sendiri, dan jika kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2025

Penulis,



Shiva Umeira

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir dengan judul **“Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya”** Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana program studi dalam bidang Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tercapai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora kemudian kepada Bapak Mukhtaruddin, S.Ag.,M.L.I.S selaku Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, dan Bapak T. Mulkan Safri, M.IP selaku Sekretaris sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti, serta jajaran staf Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah menyediakan fasilitas penunjang perkuliahan dengan baik sehingga peneliti dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan lancar.
2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ibu Nurhayati Ali Hasan, M.LIS., selaku dosen pembimbing. Bimbingan, arahan, dan dukungan Ibu yang tiada henti telah menjadi kunci utama dalam penyelesaian skripsi ini. Setiap masukan dan motivasi dari Ibu sangat

berarti, membantu penulis melewati berbagai tantangan hingga akhirnya karya ini dapat tersusun dengan baik.

3. Dengan segenap hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Ayah dan Mama. Terima kasih karena telah menjadi panutan dan mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, serta perjuangan. Setiap lembar skripsi ini adalah wujud dari doa-doa dan dukungan kalian. Cinta kalian adalah fondasi terkuat yang membuat penulis mampu melewati semua tantangan.
4. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua abang dan adik. Terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, perhatian, dan semangat yang kalian berikan menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam melewati setiap tantangan.
5. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar atas doa dan dukungan yang tak pernah putus. Tak lupa, kepada sahabat-sahabat, Sri Rahmadani, Hidayanti, dan terkhusus El Yordan, terima kasih telah hadir di setiap proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan kalian sangat berarti, membuat setiap tantangan terasa lebih ringan.
6. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya beserta seluruh jajaran staf dan pegawai, yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bantuan informasi yang sangat berharga dalam proses penelitian. Tanpa dukungan dari instansi tersebut, penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat peneliti hargai untuk

penyempurnaan dan peningkatan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Sejujurnya, peneliti ini tidak mampu membalas semua orang yang telah menunjukkan kasih sayang dan dukungan nya, termasuk keluarga, bapak, ibu, dan teman-teman. Peneliti berdoa semoga Allah, Yang Maha Pengasih, membalas semua kebaikan ini. Aamiin.

Banda aceh, 19 Agustus 2025
Penulis,

Shiva Umeira
210503075



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penjelasan Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	16
A. Kajian Pustaka	16
B. Pemberdayaan Perempuan	20
1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	20
2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan	21
3. Peran Perpustakaan Umum dalam Pemberdayaan Perempuan	24
C. Program Inklusi Sosial.....	26
1. Pengertian Program Inklusi Sosial	26
2. Tujuan dan Manfaat Program Inklusi Sosial di Perpustakaan Umum	29
3. Pelaksanaan program inklusi sosial di perpustakaan umum.....	31
4. Sasaran Program Inklusi Sosial untuk Perempuan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	47

1. Upaya Dinas Perpustakaan dalam Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan.....	47
2. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan.....	53
BAB V	
PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

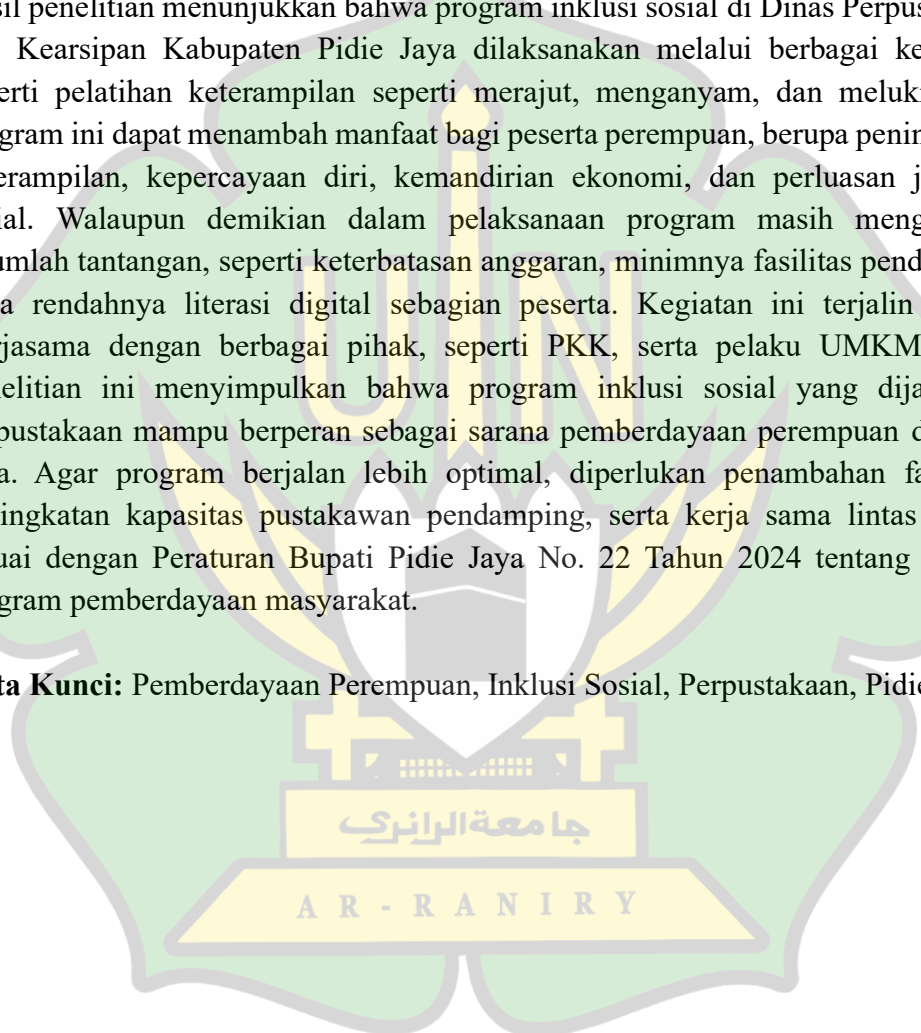
- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya
- Lampiran 4 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui Program Inklusi Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan program inklusi sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan seperti merajut, menganyam, dan melukis inai. Program ini dapat menambah manfaat bagi peserta perempuan, berupa peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, kemandirian ekonomi, dan perluasan jejaring sosial. Walaupun demikian dalam pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya literasi digital sebagian peserta. Kegiatan ini terjalin berkat Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti PKK, serta pelaku UMKM lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program inklusi sosial yang dijalankan perpustakaan mampu berperan sebagai sarana pemberdayaan perempuan di Pidie Jaya. Agar program berjalan lebih optimal, diperlukan penambahan fasilitas, peningkatan kapasitas pustakawan pendamping, serta kerja sama lintas sektor sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 22 Tahun 2024 tentang sinergi program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Inklusi Sosial, Perpustakaan, Pidie Jaya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemberdayaan perempuan masih menjadi isu penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak perempuan belum memperoleh akses yang memadai terhadap pendidikan, informasi, dan keterampilan untuk berkembang. Akibatnya, mereka kurang percaya diri, tidak mandiri secara ekonomi, dan terbatas dalam partisipasi sosial. Padahal, perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui lembaga seperti perpustakaan yang kini berkembang menjadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan agar mereka memiliki kekuatan, kendali, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan atas kehidupannya sendiri, baik di ranah domestik maupun publik. Menurut Prijono dan Pranarka, pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan keberdayaan atau kemampuan individu atau kelompok agar dapat mandiri dan menentukan arah hidupnya sendiri secara sadar dan aktif.¹ Retno dan Rohmiyati menyebutkan peningkatan pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna memperbaiki kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) dengan cara membuat mereka berdaya, memiliki semangat bekerja untuk memerangi kekurangan dan

¹Prijono, O.S, dkk, “*Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*”, Jakarta: CSIS Press, 1996, hlm.55.

keterbelakangan masyarakat dengan harapan membangun diri mereka sendiri untuk lebih maju dan sejahtera.² Dalam konteks perempuan, pemberdayaan menjadi proses untuk membebaskan perempuan dari belenggu ketertinggalan sosial, ekonomi, budaya, dan politik akibat sistem patriarki yang telah mengakar dalam Masyarakat.³

United Nations Development Programme mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai upaya untuk memberikan akses dan kontrol atas sumber daya serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam keluarga, masyarakat, hingga negara.⁴ Pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tujuan ke-5 secara khusus menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa isu pemberdayaan perempuan sangat penting di bahas, pemberdayaan Perempuan bukan sekadar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran kritis, transformasi sosial, dan keberdayaan struktural. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan bentuk kegiatan yang terintegrasi. Salah satu bentuk utamanya adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui pendidikan, perempuan memperoleh akses terhadap informasi, teknologi, dan nilai-nilai baru yang mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam kehidupan

²Sitairesmi Suryani Retno, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi Kasus Di Rumah Pintar 'Sasana Ngudi Kawruh' Kelurahan Bandarharjo-Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 157–66

³Rohmah, Nur, "Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Gender." *Jurnal Studi Gender Al-Azhar Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm.55–67

⁴UNDP, "Human Development Report". New York: Oxford University Press, 1995.

⁵ UN Women, *Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*, diakses 13 Agustus 2025.

sosial dan ekonomi. Pendidikan literasi dasar, literasi digital, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan rumah tangga merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan ini.⁶

Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menjadi bentuk dominan dalam meningkatkan kemandirian perempuan. Perempuan yang memiliki akses terhadap pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pelatihan manajemen keuangan berpeluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Program-program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), koperasi perempuan, dan pelatihan UMKM telah terbukti efektif dalam mendukung perempuan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.⁷

Pemberdayaan perempuan memiliki dampak besar terhadap kemajuan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Data dari UN Women menunjukkan bahwa perempuan yang berdaya cenderung lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak, mengelola keuangan keluarga secara sehat, serta berkontribusi dalam pembangunan komunitas. Di sisi lain, pemberdayaan perempuan juga berkorelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.⁸

Menurut laporan World Bank, jika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, maka Produk Domestik Bruto (PDB) global dapat meningkat hingga 26 persen pada tahun 2025.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya soal keadilan sosial, melainkan juga

⁶Safira, F, “Peran Perpustakaan dalam Pemberdayaan Perempuan.” *Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca*, Vol. 35, No. 1, 2019, hlm. 23–32

⁷Ramadani, “Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan.” *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No.3, 2020, hlm. 677–690

⁸UN Women, *Progress of the World's Women 2015–2016: Transforming Economies*, 2015

⁹World Bank, *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. Washington, DC, 2013

tentang efisiensi ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Pemberdayaan perempuan juga terbukti mampu menurunkan angka kekerasan berbasis gender, memperkuat kohesi sosial, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam konteks pembangunan daerah, perempuan yang diberdayakan mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan pemberdayaan keluarga.¹⁰

Namun pada kenyataannya, kesenjangan gender masih terjadi dalam akses pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan layanan publik, terutama di wilayah pedesaan.¹¹ Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran sepanjang hayat berperan penting dalam menunjang upaya pemberdayaan perempuan. Dalam kerangka perpustakaan berbasis inklusi Sosial yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), perpustakaan diharapkan menjadi ruang aman dan inklusif yang menyediakan akses informasi, pelatihan keterampilan, serta ruang ekspresi bagi kelompok marginal termasuk perempuan.¹²

Program inklusi sosial menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan yang mampu membangun kemandirian masyarakat melalui tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan layanan berbasis teknologi informasi, pelibatan masyarakat secara aktif dalam program-program perpustakaan, dan kolaborasi antar lembaga. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perpustakaan berfungsi

¹⁰Retno, S.S, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan." Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 4, No.2, 2015, hlm. 157–166

¹¹*United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

¹²Perpustakaan Nasional RI, *Pedoman Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Jakarta: Perpusnas, 2020, hlm. 5.

sebagai pusat pelatihan keterampilan, literasi digital, literasi keuangan, serta penguatan usaha mikro perempuan.¹³

Secara teoritis inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial baik secara menyeluruh ataupun sebagian.¹⁴ Perpustakaan yang melayani masyarakat pada umumnya harus menyediakan fasilitas, koleksi, dan layanan yang membantu setiap lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, lanjut usia, pelajar, dan individu berkebutuhan khusus dan yang belum menemukan pekerjaan tanpa meninggalkan sekelompok masyarakat tersebut. Dalam hal ini yang menjadi acuan untuk perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.¹⁵

Konsep inklusi sosial ini membangun masyarakat agar semakin terbuka dengan masyarakat lainnya oleh karena itu, konsep inklusi sosial ini perlu dipromosikan dengan baik mulai dari akademisi maupun praktisi untuk saling membantu dalam memberdayakan masyarakat. Ketika semua masyarakat sudah saling bahu membahu dalam memberdayakan satu sama lain maka akan terciptanya suasana di mana masyarakat yang saling menyukai, mengayomi, dan percaya sehingga dapat mudah untuk mencapai tujuannya. Konsep inklusi sosial, pada hakikatnya adalah upaya untuk membuat seluruh lapisan masyarakat terbuka.¹⁶

¹³Haryanti, W.T, “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.” *Talenta Conference Series*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 114–120

¹⁴Woro Titi Haryanti, “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 114
<https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728>.

¹⁵Siti Nurul Kamidah and Darisy Syafaah, “Pengembangan Keterampilan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpustakaan Lentera Desa Buluagung Karanganyar Trenggalek,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 220–37.

¹⁶World Bank, “*Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*”, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm.3-7.

Dengan demikian, Inklusi sosial merupakan proses peningkatan martabat dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi atau mengambil peran dalam masyarakat dengan baik

Pada saat ini model transformasi yang banyak dilakukan dan dikembangkan di berbagai perpustakaan ialah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu dengan memanfaatkan program penguatan literasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.¹⁷ Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi bentuk dukungan perpustakaan dalam mewujudkan program pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan atau Sustainable Development Goals (SDG'S). Sebagaimana disebutkan dalam keputusan kepala perpustakaan Nasional RI No. 92 Tahun 2017 tentang rencana strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015- 2019.¹⁸

Perpustakaan berbasis inklusi sosial Sebagai wujud nyata perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi lebih dari sekadar pusat informasi. Perpustakaan berperan sebagai pusat sosial dan budaya yang memberdayakan masyarakat serta mendukung demokratisasi komunitas lokal, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat.¹⁹

Perpustakaan umum berbasis inklusi sosial menekankan pendekatan layanan publik dengan menyajikan beragam koleksi dan meningkatkan tingkat

¹⁷Rachman, R. A, dkk, “Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang”. In Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 907–918.

¹⁸(Transformasi et al., 2022)

¹⁹Woro Titi Haryanti, *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2019

literasi informasi dan teknologi. Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.²⁰

Program inklusi sosial di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang menegaskan bahwa perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang belajar masyarakat, pusat kegiatan sosial, serta sarana pemberdayaan ekonomi.²¹ Regulasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya Pasal 4, yang menyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka secara adil tanpa diskriminasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.²²

Selain itu, di tingkat lokal, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2024 juga menjadi acuan penting karena mengatur tentang sinergi antarinstansi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi sosial. Regulasi ini menekankan bahwa kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah desa, PKK, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, harus diperkuat agar program perpustakaan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan, terutama perempuan dan masyarakat marginal. Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan program inklusi sosial di perpustakaan daerah, termasuk di Kabupaten

²⁰Mhd Ardi Wiranda, dkk, “*Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi sosial*”.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 129.

²² Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Jakarta: Perpustnas, 2021.

Pidie Jaya, memiliki legitimasi formal sekaligus arah kebijakan yang jelas untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.²³

Pemberdayaan perempuan melalui program inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan dan termarginalkan dalam banyak aspek kehidupan, terutama di daerah pedesaan. Karena jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Pidie Jaya sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap pendidikan, keterampilan, teknologi informasi, dan kesempatan ekonomi yang memadai.²⁴ Data BPS Aceh tahun 2023 mencatat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Pidie Jaya mencapai angka tertinggi di provinsi, yaitu 0,786, Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terendah di Aceh pada tahun 2023 tercatat di Kota Subulussalam, yaitu sebesar 0,478.²⁵ Banyak perempuan bekerja di sektor informal tanpa pelatihan atau dukungan yang memadai, sehingga sulit mandiri secara ekonomi.²⁶ Disisi lain potensi yang dimiliki sebenarnya cukup besar untuk mendorong kemajuan perempuan, baik dari segi sumber daya alam maupun potensi sosial-budaya. Kabupaten Pidie Jaya memiliki sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro yang berkembang, yang jika diintegrasikan dengan program pelatihan dan pendampingan yang tepat dapat menjadi sumber penghasilan berkelanjutan

²³Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2024 tentang Sinergi Antarinstansi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi Sosial.

²⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Pidie Jaya Dalam Angka 2024. Meureudu: BPS 2024

²⁵AJNN, Pidie Jaya Wilayah Ketimpangan Gender Tertinggi di Aceh. 2023.

Diakses dari: <https://www.ajnn.net/news/pidie-jaya-wilayah-ketimpangan-gender-tertinggi-di-aceh>

²⁶Nayatillah, *Descriptive Analysis of the Implementation of Gender Responsive Policies for Poverty Alleviation in Aceh*. ResearchGate. 2025.

Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/390230572>

bagi perempuan. Keterbatasan ini menjadikan perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan, ketergantungan ekonomi, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Perempuan di daerah ini, khususnya yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, memerlukan akses yang setara terhadap sumber daya informasi, pelatihan, serta fasilitas yang mendukung pengembangan diri. Oleh karena itu, peran aktif perpustakaan dalam menciptakan program-program berbasis kebutuhan lokal menjadi penting untuk menjawab tantangan kesenjangan gender dan ketidaksetaraan sosial.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan program inklusi sosial yang dirancang untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Program ini terbukti membuka akses bagi perempuan untuk memperoleh pelatihan keterampilan, literasi digital, literasi keuangan, serta pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga.

Dengan demikian, keberadaan perpustakaan sebagai pusat layanan informasi dan pembelajaran sepanjang hayat memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan ruang inklusif yang mampu menjangkau kelompok rentan, termasuk perempuan. Di Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berupaya mengimplementasikan program inklusi sosial melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha mikro, hingga edukasi literasi digital yang secara langsung menyasar kaum perempuan.

Namun, sejauh ini belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana perpustakaan yang berbasis Inklusi sosial ini sebagai institusi publik khususnya kabupaten Pidie Jaya mampu berperan dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kebijakan berbasis inklusi sosial di sektor perpustakaan daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menelusuri lebih jauh bagaimana Upaya implementasi program inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, bagaimana Upaya ini dapat berkontribusi nyata dalam proses pemberdayaan perempuan, serta kendala apa saja yang dihadapi perpustakaan untuk memberdayakan Perempuan melalui program inklusi sosial.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai **Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja program inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie Jaya dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan melalui program inklusi sosial?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan perempuan melalui program inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi program pemberdayaan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah literatur ilmiah di bidang ilmu perpustakaan terkait peran perpustakaan dalam pemberdayaan perempuan melalui program inklusi sosial.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan tentang strategi perpustakaan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial berbasis literasi.
- c. Memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perpustakaan dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui akses informasi dan keterampilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perpustakaan Pidie Jaya sebagai bahan evaluasi terhadap program inklusi sosial.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman dalam menganalisis implementasi kebijakan Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui Program Inklusi Sosial serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu perpustakaan.

E. Penjelasan Istilah

1. Upaya pemberdayaan Perempuan

Secara umum, istilah upaya adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai “usaha” atau “ikhtiar” yang

ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi suatu permasalahan atau keadaan tertentu.²⁷ Istilah ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan "effort", "attempt", atau "endeavor", yang artinya “usaha”, “Upaya”, atau “ikhtiar”. Yang merujuk pada segala bentuk tindakan yang memerlukan energi, pemikiran, dan ketekunan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.²⁸ Dalam konteks sosial, istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai langkah sistematis dan strategis yang dilakukan oleh lembaga atau individu untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran tertentu.

Istilah pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan, dan imbuhan "pem-an" yang menjadikannya sebagai proses. Dalam KBBI, pemberdayaan berarti proses, cara, atau perbuatan menjadikan seseorang atau kelompok memiliki daya atau kemampuan.²⁹ Priyono dan Pranarka, mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri.³⁰

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin wanita yang memiliki potensi serta peran yang luas dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam konteks sosiokultural, perempuan sering kali mengalami marginalisasi akibat dominasi sistem patriarki. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

²⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Kemendikbud, 2016.

²⁸Babla Dictionary. "Upaya" Translation. 2024.
<https://en.bab.la/dictionary/indonesian-english/upaya>

²⁹Moser, C, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge, 1993,hlm.74-78.

³⁰Priyono, O.S, dkk, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996,hlm.59-61.

Against Women (CEDAW) menyatakan bahwa perempuan adalah individu yang berhak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.³¹

Perempuan memegang peran penting sebagai pendidik utama dalam keluarga, pelaku ekonomi mikro, dan penjaga nilai budaya. Namun demikian, dalam realitas sosial di berbagai daerah, perempuan masih sering terpinggirkan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dalam berbagai bidang kehidupan secara setara dengan laki-laki. Menurut UN Women, pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kapasitas individu dan kolektif perempuan untuk mengambil keputusan, mengakses sumber daya, serta membangun kehidupan yang lebih baik.³² Menurut Azis Muslim, pemberdayaan perempuan merupakan proses yang sistematis dan terencana untuk memberikan ruang kepada perempuan dalam berperan aktif dalam pembangunan melalui peningkatan keterampilan, wawasan, dan posisi sosial.³³ Hopson dan Scally juga menekankan pentingnya pelatihan keterampilan hidup sebagai bagian dari proses pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan.³⁴

Adapun istilah upaya pemberdayaan perempuan yang penulis maksud ialah segala bentuk usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta partisipasi perempuan dalam

³¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW

³²UN Women, *Progress of the World's Women 2015–2016: Transforming Economies, Realizing Rights*. New York: United Nations, 2015.

³³Muslim, Azis, *Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm.80.

³⁴Hopson, dkk, *12 Langkah Menuju Sukses Melalui Pelayanan yang Bermutu*. Jakarta: Arcan, (2007),48-49.

kehidupan sosial, ekonomi, dan Pendidikan melalui program inklusi sosial di perpustakaan.

2. Program Inklusi Sosial

Program adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dirancang secara terstruktur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Program biasanya disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, sasaran, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Hans Hochhozer menyatakan bahwa suatu program adalah rangkaian kegiatan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi yang dilakukan oleh satu atau beberapa lembaga pemerintah, bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara kolektif.³⁵

Secara konseptual, inklusi sosial merupakan kebalikan dari eksklusi sosial sebuah kondisi ketika individu atau kelompok terpinggirkan dan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara penuh, sehingga berisiko mengalami keterasingan dan kehilangan jati diri dalam komunitasnya.³⁶ Simarmata menegaskan bahwa inklusi sosial adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam menciptakan ruang partisipatif yang menjamin akses, kesetaraan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.³⁷

Sementara itu, perpustakaan berbasis inklusi sosial diposisikan tidak lagi sekadar sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, melainkan sebagai

³⁵Hans Hochhozer dalam Adi Susanto, “Implementasi Program Bahasa (Arab, Inggris, dan Indonesia) di Ma’had Al-Jami’ah UINFAS Bengkulu,” Jurnal Pendidikan Tematik, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 301.

Diakses dari <https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/697>

³⁶Prima Putra Budi Gutama dan Bambang Widiyahseno, “Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa,” Jurnal Reformasi, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 74.

Diakses dari http://eprints.umpo.ac.id/6473/2/Artikel_Prima%20Putra.pdf

³⁷Simarmata dalam Dekki Umamur Ra’is, “Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa,” Jurnal Reformasi, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 92.

pusat pembelajaran sepanjang hayat yang berfungsi dalam memperkuat literasi informasi berbasis TIK, pengembangan potensi masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta ruang pemberdayaan yang memperjuangkan hak dan keadilan sosial.³⁸ Dalam ruang inklusif ini, perpustakaan diharapkan mampu merangkul keragaman budaya dan mendukung transformasi sosial melalui layanan dan program berbasis kebutuhan masyarakat.

Adapun istilah program inklusi sosial yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan terencana yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan di kabupaten Pidie Jaya, melalui kegiatan pelatihan keterampilan, penguatan literasi informasi dan digital, serta penyediaan ruang partisipatif yang inklusif dan ramah gender.

³⁸Woro Titi, "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 115.

Diakses dari <https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/728>